

KUTUBKHANA
Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan
P-ISSN1693-8186 E-ISSN 2407-1633

Simbiosis Harmoni: Islam dan Politik dalam Masyarakat Kontemporer

Isrofiyah Laela Khasanah¹, Paryanto²

¹Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

²Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

E-mail: isrofiyah75@gmail.com, paryantorambang@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menggambarkan simbiosis harmoni antara Islam dan politik dalam masyarakat kontemporer. Islam memiliki pengaruh signifikan dalam politik dan kebijakan publik di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Konsep politik Islam mencakup prinsip-prinsip agama yang membentuk landasan dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Islam dapat mempengaruhi kebijakan publik yang adil dan inklusif, serta memperkuat kesejahteraan sosial. Namun, tantangan dan keterbatasan juga ada dalam mewujudkan konsep politik Islam yang ideal. Rekomendasi termasuk meningkatkan dialog dan pemahaman antara pemimpin politik dan ulama, memastikan partisipasi masyarakat, dan menerapkan pendekatan kontekstual. Simbiosis harmoni antara Islam dan politik dapat menghasilkan stabilitas politik dan kesejahteraan dalam masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: islam, politik, masyarakat kontemporer

Abstract

This article describes the symbiosis of harmony between Islam and politics in contemporary society. Islam has a significant influence on politics and public policy in Muslim majority countries. The political concept of Islam includes religious principles that form the basis of governance. Research shows that the implementation of Islamic values can influence fair and inclusive public policies, as well as strengthen social welfare. However, challenges and limitations also exist in realizing the ideal concept of Islamic politics. Recommendations include increasing dialogue and understanding between political leaders and clerics, ensuring community participation, and adopting a contextual approach. The symbiosis of harmony between Islam and politics can produce political stability and prosperity in contemporary society.

Keywords: islam, politics, contemporary society

Pendahuluan

Hubungan antara Islam dan politik telah menjadi perhatian utama dalam konteks masyarakat kontemporer. Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah sistem nilai yang mencakup aspek sosial, politik, dan ekonomi (Ridwan, 2017). Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara Islam dan politik serta bagaimana keduanya dapat saling mempengaruhi dalam menciptakan harmoni dalam masyarakat kontemporer. Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat, juga memberikan pedoman dalam urusan politik dan pemerintahan (Paralihan, 2019). Masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia mencari cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama mereka ke dalam sistem politik yang ada, dengan tujuan mencapai keadilan sosial, keberlanjutan, dan stabilitas politik (Rahmanu, 2022).

Simbiosis harmonis antara Islam dan politik merujuk pada relasi timbal balik yang saling menguntungkan antara dua bidang tersebut, di mana nilai-nilai Islam memberikan pedoman moral dan etika dalam politik, sementara politik memberikan konteks dan sarana bagi implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata di bidang sosial, politik dan pemerintahan. Perspektif lain melihat pentingnya integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan politik dan tindakan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial (Ridwan, 2022).

Islam dan politik adalah dua entitas yang memiliki hubungan yang kompleks dan signifikan dalam masyarakat dan terus menarik perhatian hingga kini. Sejak awal sejarahnya, Islam telah menjadi sumber inspirasi bagi sistem politik yang mengatur kehidupan komunitas Muslim (Linjakumpu, 2008; Tibi, 2008). Ajaran dan prinsip-prinsip Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana umat Muslim harus berperilaku dalam konteks politik dan bagaimana sistem politik harus diatur untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan (Sachedina, 2003; Tibi, 2005). Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi hubungan antara Islam dan politik, memperhatikan peran dan dampaknya dalam masyarakat kontemporer. Islam bukan hanya agama ritual dan spiritual, tetapi juga memiliki dimensi politik yang kuat. Konsep politik dalam Islam mencakup prinsip-prinsip keadilan, persamaan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Islam memberikan pedoman tentang bagaimana pemerintah harus beroperasi, bagaimana kekuasaan harus didistribusikan, dan bagaimana masyarakat harus dikelola secara adil.

Dalam masyarakat kontemporer, Islam memainkan peran penting dalam politik. Negara-negara dengan mayoritas Muslim sering mengacu pada ajaran Islam sebagai sumber hukum dan landasan moral dalam sistem politik mereka. Prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat, menjadi dasar untuk kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik (Sachedina, 2003). Gerakan politik Islam juga menjadi kekuatan politik yang signifikan, dengan tujuan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks politik dan sosial. Namun, hubungan antara Islam dan politik juga menghadapi tantangan dan konflik. Perbedaan interpretasi terhadap ajaran Islam dan

persaingan kepentingan politik seringkali menjadi sumber ketegangan. Ada tantangan dalam menerjemahkan konsep politik Islam ke dalam praktik politik yang efektif dan memastikan keadilan serta inklusi bagi semua warga negara.

Dalam konteks ini, penting untuk terus mengadakan dialog dan pemahaman antara pemimpin politik dan ulama, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik lokal juga penting untuk memastikan keberlanjutan hubungan harmonis antara Islam dan politik dalam masyarakat kontemporer.

Secara keseluruhan, Islam dan politik saling terkait dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana sistem politik harus diatur untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan (Price, 1999). Namun, implementasi konsep politik Islam menghadapi tantangan dan memerlukan dialog, pemahaman, serta kontekstualisasi. Dalam masyarakat kontemporer yang kompleks, penting untuk menjaga hubungan yang harmonis antara Islam dan politik untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi masyarakat Muslim. Sebagai agama yang luas dan kompleks, Islam mengandung berbagai aspek yang meliputi agama, moralitas, hukum, dan politik. Prinsip-prinsip Islam mencakup pedoman tentang tata kelola pemerintahan, pengaturan hukum, keadilan sosial, dan partisipasi politik.

Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam Al-Quran dan hadis, sumber-sumber utama ajaran Islam. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad (SAW), sementara hadis adalah catatan mengenai tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad (SAW) (Christman, 2009). Kedua sumber ini menjadi dasar bagi umat Muslim dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam konteks politik. Salah satu konsep sentral dalam Islam adalah khilafah atau kepemimpinan umat. Konsep ini merujuk pada kepemimpinan politik dalam Islam yang dijalankan oleh seorang khalifah yang dianggap sebagai pemimpin spiritual dan politik. Khalifah bertanggung jawab untuk menjalankan keadilan sosial, menjaga keamanan dan kestabilan, serta mempertahankan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Sejarah awal Islam mencatat adanya khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang memimpin umat Muslim dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam.

Namun, dalam masyarakat kontemporer, pemahaman dan implementasi konsep khilafah telah menjadi kontroversial dan bervariasi. Beberapa kelompok dan organisasi Islam yang pemahaman keagamaan bercorak skripturalis masih menganut pandangan bahwa pemerintahan Islam yang ideal adalah berdasarkan pada khilafah yang dijalankan oleh seorang khalifah (Zain, 2019). Mereka berpendapat bahwa hanya melalui pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh, keadilan sosial dan keberlanjutan dapat tercapai sepenuhnya. Di sisi lain, terdapat pula pendekatan yang berbeda dalam memahami hubungan antara Islam dan politik. Beberapa kalangan Muslim percaya bahwa Islam memberikan panduan moral dan etika bagi individu dalam berpartisipasi dalam politik, tetapi tidak mengatur secara spesifik tentang sistem politik

yang harus diadopsi oleh umat Muslim (Qorib, 2020). Mereka berpendapat bahwa bentuk pemerintahan dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial-politik suatu negara, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam dan menghormati hak asasi manusia (Mahirah, 2018).

Dalam konteks politik modern, umat Muslim di berbagai negara telah berinteraksi dengan sistem politik yang berbeda-beda, termasuk demokrasi, monarki, atau bentuk pemerintahan lainnya (Budiarti, 2018). Dalam negara-negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Turki, dan Mesir, telah terjadi dinamika politik yang melibatkan partai politik yang didasarkan pada Islam. Partai-partai ini berupaya mewakili aspirasi dan kepentingan umat Muslim, dan dalam beberapa kasus berhasil memperoleh kekuasaan politik. Namun, keterlibatan agama dalam politik juga telah menimbulkan kontroversi dan konflik. Ada kalangan, terutama kelompok liberalis dan sekuler, yang percaya bahwa agama seharusnya tidak terlibat dalam urusan politik, dan bahwa negara harus bersifat sekuler dan independen dari agama apapun (Zhafira, 2017). Pandangan ini didasarkan pada prinsip pemisahan agama dan negara, yang meyakini bahwa campur tangan agama dalam politik dapat mengancam kebebasan beragama dan kesetaraan di dalam masyarakat.

Tantangan dan pertentangan dalam hubungan antara Islam dan politik juga dapat ditemukan dalam konteks global. Terorisme yang dilakukan oleh sekelompok individu atau organisasi yang mengklaim melakukan aksi kekerasan dan tindakan terorisme atas nama Islam telah mencoreng citra Islam dan memperburuk persepsi terhadap hubungan antara Islam dan politik (Mubarak, 2019). Hal ini juga telah mempengaruhi persepsi umum terhadap Muslim secara keseluruhan, mengakibatkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap komunitas Muslim di berbagai belahan dunia (Fauzi, 2017). Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi umat Muslim dan masyarakat luas untuk memahami hubungan yang kompleks antara Islam dan politik. Pemahaman yang tepat dan literasi informasi yang cukup dapat mencegah ekstremisme dan intoleransi, sambil mempromosikan kerukunan antarumat beragama dan keadilan sosial.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa konsep simbiosis harmonis antara Islam dan politik telah diperdebatkan secara luas (Nurdin, 2016), ada kesenjangan kajian yang perlu dijelajahi lebih lanjut dalam konteks masyarakat kontemporer. Studi yang berjudul "Dinamika Dakwah dan Politik Islam" yang dilakukan oleh Daulay pada tahun 2020, menguji interaksi antara pemikiran politik Islam dan praktek politik dalam konteks negara Malaysia. Penelitian ini memberikan pemahaman awal tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat membentuk kebijakan politik, namun masih diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam untuk memahami dinamika hubungan tersebut dalam berbagai konteks dan lingkungan sosial yang berbeda (Daulay, 2020). Selain itu, penelitian Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi yang berjudul "Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi" yang dilakukan oleh Hoddin pada tahun 2020, melihat bagaimana pemikiran politik Islam dapat berdampak pada dinamika politik dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi politik yang

berbasis nilai-nilai Islam, namun masih ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut yang melibatkan partisipasi dari berbagai latar belakang sosial dan politik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Studi tentang Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran yang dilakukan oleh Hamzani dan Aravik pada tahun 2021, menganalisis sejarah perkembangan Islam politik dan mengeksplorasi berbagai aliran pemikiran yang mempengaruhi interaksi antara Islam dan politik (Hamzani & Aravik, 2021). Penelitian ini memang memberikan wawasan tentang latar belakang sejarah serta dinamika hubungan antara Islam dan politik dalam pentas sejarah. Karena itu, masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami dinamika hubungan Islam dan politik dalam masyarakat kontemporer.

Meskipun telah ada sejumlah penelitian yang membahas tentang hubungan antara Islam dan politik, tetapi masih terdapat kesenjangan yang perlu diisi. Oleh karena itu, studi ini berusaha mengeksplorasi lebih mendalam dan komprehensif untuk menjelajahi hubungan simbiosis harmonis antara Islam dan politik dalam masyarakat kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan simbiosis harmonis antara Islam dan politik dalam masyarakat kontemporer, dengan fokus pada dampaknya terhadap kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan stabilitas sosial. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya keseimbangan dan kerjasama antara Islam dan politik dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat kontemporer.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah tinjauan pustaka (literature review). Pendekatan ini melibatkan analisis dan sintesis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu hubungan antara Islam dan politik dalam masyarakat kontemporer (Darmalaksana, 2020). Langkah-langkah yang diikuti dalam penelitian tinjauan pustaka ini meliputi:

1. Identifikasi Topik: Topik penelitian yang spesifik telah diidentifikasi, yaitu hubungan antara Islam dan politik dalam masyarakat kontemporer. Dalam konteks ini, penelitian akan melihat bagaimana Islam mempengaruhi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan partisipasi politik di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Fokus akan diberikan pada implementasi nilai-nilai Islam, seperti keadilan sosial dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta tantangan dan konflik yang terkait dengan penggabungan agama dan politik. Selain itu, penelitian akan memperhatikan gerakan politik Islam dan dinamika antara otoritas politik dan agama dalam membentuk kebijakan dan stabilitas politik.
2. Pencarian Literatur: Melalui akses ke database akademik, jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber tepercaya lainnya, dilakukan pencarian literatur yang relevan dengan topik penelitian "Simbiosis Harmoni: Islam dan Politik dalam Masyarakat Kontemporer". Kata kunci yang telah ditentukan, yaitu "simbiosis harmoni", "Islam",

"politik", "masyarakat kontemporer", "keadilan sosial", "prinsip-prinsip ekonomi Islam", "kebijakan publik", "implementasi nilai-nilai Islam", "partisipasi masyarakat", "tantangan dan konflik", "gerakan politik Islam", "otoritas politik dan agama", "dialog dan pemahaman", "kontekstualisasi nilai-nilai Islam", dan "stabilitas politik", digunakan dalam pencarian ini. Hasil pencarian literatur yang relevan menjadi landasan penting dalam mengembangkan pemahaman dan analisis mengenai hubungan antara Islam dan politik dalam konteks masyarakat kontemporer.

3. Seleksi Literatur: Setelah melakukan pengumpulan artikel dan sumber literatur yang relevan, kami menjalankan proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Kami mempertimbangkan sumber-sumber yang sesuai dengan topik penelitian, memiliki kredibilitas yang tinggi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hubungan antara Islam dan politik. Sumber-sumber yang memenuhi kriteria tersebut dipilih untuk disertakan dalam tinjauan pustaka ini, dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai topik yang dibahas.
4. Analisis Literatur: Dalam penelitian ini, sumber-sumber literatur yang terpilih dianalisis secara komprehensif. Berbagai informasi penting, temuan, argumen, dan perspektif yang relevan dengan topik penelitian telah diidentifikasi dan diekstraksi. Melalui proses ini, literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian telah dikaji secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Islam dan politik dalam konteks masyarakat kontemporer. Hal ini memastikan bahwa penelitian ini didasarkan pada dasar yang kuat dan memperkaya pemahaman kita tentang topik yang sedang dibahas.
5. Sintesis dan Penulisan: Setelah menganalisis literatur yang ada, informasi yang ditemukan dari berbagai sumber disintesis secara komprehensif. Dalam proses tersebut, temuan utama, pola, dan tren yang muncul dalam hubungan antara Islam dan politik dikaji secara seksama. Penulis kemudian mengorganisir informasi tersebut dengan cara yang logis dan sistematis. Selanjutnya, artikel ini disusun dengan memperhatikan struktur yang jelas, mengikuti alur yang teratur, dan didukung oleh argumen yang koheren. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai simbiosis harmoni antara Islam dan politik dalam masyarakat kontemporer.

Melalui metode tinjauan pustaka ini, artikel ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara Islam dan politik dalam masyarakat kontemporer, dengan merujuk pada kontribusi penelitian dan pemikiran yang ada dalam literatur yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Artikel ilmiah ini membahas hubungan simbiosis harmonis antara Islam dan politik dalam masyarakat kontemporer. Tujuan analisis ini adalah untuk mengeksplorasi

bagaimana Islam dan politik dapat saling berdampingan dan saling mempengaruhi secara positif dalam konteks masyarakat kontemporer. Melalui pembahasan ini, diharapkan akan terlihat bagaimana integrasi yang harmonis antara Islam dan politik dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Pentingnya memahami hubungan antara Islam dan politik dalam masyarakat kontemporer terletak pada pemahaman bahwa agama dan politik bukanlah entitas yang terpisah, tetapi saling terkait dan dapat saling mempengaruhi. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya merupakan agama yang mengatur kehidupan spiritual individu, tetapi juga memberikan kerangka nilai dan prinsip-prinsip yang dapat membentuk sistem politik dan kebijakan publik (Arifin, n.d.).

Dalam masyarakat kontemporer yang kompleks dan dinamis, simbiosis harmonis antara Islam dan politik dapat menghasilkan dampak positif dalam berbagai bidang. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik dapat mempromosikan keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Kurniawan, 2021). Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan keadilan distributif, dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, integrasi Islam dalam politik dapat memberikan landasan moral yang kuat untuk pengambilan keputusan politik dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam, termasuk musyawarah (konsultasi) dan partisipasi masyarakat, kebijakan publik dapat mencerminkan aspirasi rakyat dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembentukan kebijakan (Aziz, 2018).

Namun, untuk mencapai simbiosis harmonis yang optimal antara Islam dan politik, tantangan dan hambatan perlu diatasi. Perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap ajaran Islam dapat menyebabkan perbedaan pendapat dan perselisihan politik (Muarif & Yunus, 2019). Selain itu, ketegangan antara otoritas politik dan otoritas agama dapat mempengaruhi dinamika hubungan antara Islam dan politik. Dalam menghadapi tantangan ini, dialog dan pemahaman antara para pemimpin politik dan ulama menjadi penting. Diperlukan upaya kolaboratif untuk memperkuat integrasi Islam dalam politik dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kebhinekaan. Kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam konteks masyarakat kontemporer juga diperlukan agar kebijakan publik dapat merespons kebutuhan dan dinamika masyarakat secara tepat.

Dengan menjalin simbiosis harmonis antara Islam dan politik dalam masyarakat kontemporer, diharapkan dapat tercipta pembangunan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan berkualitas. Integrasi nilai-nilai Islam dalam politik dapat menjadi landasan moral yang kuat dalam pembuatan kebijakan publik yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial, keadilan, dan stabilitas politik.

1. Konteks Sejarah

Sejarah Islam menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara agama dan politik sejak awal peradaban Islam. Dalam periode awal Islam, negara-negara Islam didirikan

dengan fondasi agama sebagai panduan dalam penyusunan undang-undang dan tata kelola pemerintahan. Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga menjadi landasan hukum dan prinsip politik yang membentuk negara-negara Muslim. Pendirian negara-negara Islam awal, seperti Kekhalifahan Rasyidin dan Dinasti-dinasti Islam, mengakui Islam sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan politik dan sosial (Adamec, 2009). Undang-undang Syariah menjadi pijakan dalam pembuatan kebijakan, pengaturan hukum, dan tata kelola pemerintahan. Agama Islam menjadi landasan etis yang mengatur perilaku individu dan membentuk struktur politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam (Musta'id, 2022).

Meskipun ada periode ketegangan antara otoritas politik dan otoritas agama dalam sejarah Islam, namun Islam terus memainkan peran penting dalam politik dan pemerintahan di berbagai negara dengan populasi mayoritas Muslim (Fathi, 2023). Islam tidak hanya menjadi faktor budaya dan identitas, tetapi juga memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan undang-undang, institusi politik, dan pengambilan keputusan politik. Agama Islam menjadi kerangka kerja dalam pembuatan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan di negara-negara Muslim (Sachedina, 2003). Prinsip-prinsip agama seperti keadilan, kesetaraan, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat. Islam juga memberikan arahan dalam hal perlindungan hak-hak individu dan kolektif, serta menjaga keseimbangan antara kekuasaan politik dan tanggung jawab agama.

Dalam masyarakat Muslim, Islam juga mempengaruhi proses politik melalui partisipasi aktif dalam pemilihan umum, pendirian partai politik Islam, dan gerakan sosial yang mendorong perubahan berdasarkan ajaran agama. Gerakan politik Islam berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam politik, mempromosikan nilai-nilai agama dalam kebijakan publik, dan memperjuangkan keadilan sosial.

2. Prinsip-prinsip Islam dalam Politik

Islam memiliki prinsip-prinsip yang relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks politik. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, kebijaksanaan, kesetaraan, dan keamanan dapat membentuk dasar moral bagi tata kelola politik yang baik (Ikhwan, 2018; Price, 1999). Artikel ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik dan bagaimana hal tersebut dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Prinsip keadilan sosial dalam Islam menekankan pentingnya pembagian yang adil dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Kebijakan publik yang berdasarkan prinsip ini dapat mendorong pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Misalnya, program-program pemerintah yang memberikan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta kebijakan perlindungan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan.

Prinsip kebijaksanaan dalam Islam menggarisbawahi pentingnya pemikiran yang

bijaksana dalam pengambilan keputusan politik. Kebijakan publik yang berbasis pada prinsip ini melibatkan kajian yang mendalam, analisis yang cermat, serta mempertimbangkan implikasi jangka panjang bagi masyarakat. Hal ini dapat mencegah kebijakan yang impulsif atau berdampak negatif dalam jangka panjang. Prinsip kesetaraan dalam Islam menegaskan pentingnya perlakuan yang sama dan adil terhadap seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau status sosial. Kebijakan publik yang menghormati prinsip ini akan menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis, di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses hak-hak dan peluang. Prinsip keamanan dalam Islam menekankan perlunya menciptakan lingkungan yang aman, baik dari segi fisik maupun sosial. Kebijakan publik yang berfokus pada prinsip ini akan memprioritaskan keamanan dan perlindungan terhadap semua warga negara, termasuk dalam hal penegakan hukum, pencegahan konflik, dan penanggulangan ancaman keamanan (Qadir, 2018).

Implementasi prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan publik dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam yang berlandaskan pada keadilan, kebijaksanaan, kesetaraan, dan keamanan, masyarakat dapat mengalami peningkatan kesejahteraan, harmoni, dan stabilitas (Putra & Lubis, 2019). Penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk memahami dan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dalam merumuskan kebijakan publik, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan kebijakan yang responsif dan inklusif.

3. Keterlibatan Aktif Muslim dalam Politik

Pentingnya keterlibatan aktif umat Muslim dalam politik juga dianalisis dalam artikel ini. Dalam masyarakat kontemporer, partisipasi politik oleh masyarakat Muslim sangat penting untuk mempengaruhi kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan (Karim, 2016). Artikel ini membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi Islam dan individu Muslim untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik melalui partai politik, kelompok advokasi, atau posisi pemerintahan.

Dalam artikel ini, kami membahas hubungan simbiosis harmonis antara Islam dan politik dalam masyarakat kontemporer. Melalui tinjauan pustaka yang dilakukan, kami mengidentifikasi beberapa konsep utama yang relevan dan melakukan analisis terhadapnya. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari artikel ini:

a. Konsep Politik Islam

Konsep politik Islam mengacu pada kerangka pemikiran yang menggabungkan prinsip-prinsip agama Islam dengan pengaturan politik dan tata kelola negara. Konsep ini didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an, hadis, dan tradisi agama Islam yang memberikan pedoman tentang bagaimana negara dan masyarakat seharusnya diatur. Melalui analisis teori politik Islam, kami menemukan bahwa terdapat berbagai pandangan tentang

bagaimana Islam berinteraksi dengan politik (Linjakumpu, 2008; Venardos, 2010). Beberapa pandangan menekankan pentingnya pendirian negara Islam yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, di mana hukum Islam menjadi dasar hukum negara. Paham ini menekankan pentingnya menjalankan ajaran agama dalam kehidupan politik, termasuk dalam pembuatan kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik. Prinsip syariat Islam menjadi landasan dalam menjaga keadilan, kebebasan beragama, dan perlindungan hak-hak individu (Noer, 2019).

Selain itu, konsep kepemimpinan dalam Islam juga merupakan elemen penting dalam pemahaman politik Islam. Pemimpin dalam Islam diharapkan mempraktikkan keadilan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjalankan tugas-tugas kepemimpinan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip agama. Studi-studi sebelumnya telah membahas pengaruh pemikiran politik Islam terhadap partisipasi politik Muslim. Dalam konteks pemilihan umum, pemahaman politik Islam dapat mempengaruhi pemilih Muslim dalam memilih kandidat yang berkomitmen pada prinsip-prinsip Islam dan menerapkan keadilan sosial (Salih, 2009). Selain itu, pemikiran politik Islam juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik di level lokal maupun nasional, termasuk dalam pembuatan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Islam.

Partisipasi politik Muslim juga dapat terwujud melalui keanggotaan dalam partai politik yang menganut prinsip-prinsip Islam. Partai politik Islam memiliki peran penting dalam mewakili kepentingan masyarakat Muslim dan memperjuangkan implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik. Dalam masyarakat kontemporer, konsep politik Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pemikiran dan tindakan politik Muslim (Tanabora, 2020). Namun, penting untuk diakui bahwa terdapat keragaman pandangan dan interpretasi dalam pemahaman politik Islam. Pemikiran politik Islam yang inklusif dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan sosial dapat menjadi landasan yang kuat dalam membangun masyarakat yang harmonis dan adil.

b. Islam dan Kebijakan Publik

Dalam pembahasan mengenai keadilan sosial dalam Islam, kami menemukan bahwa konsep keadilan sosial bukan hanya merupakan nilai penting dalam agama ini, tetapi juga menjadi pijakan utama dalam pengaturan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim (Christman, 2009). Keadilan sosial dalam Islam melibatkan distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan, perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta perawatan terhadap kaum miskin dan lemah. Selain nilai keadilan sosial, prinsip-prinsip ekonomi Islam juga memiliki dampak yang signifikan dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat Muslim. Konsep ekonomi Islam melarang riba (bunga) dan mempromosikan keadilan distributif, kepemilikan yang adil, dan solidaritas sosial. Prinsip-prinsip ini mendorong adanya kebijakan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengentasan kemiskinan (Suhaili, 2019).

Penelitian sebelumnya telah memberikan bukti kuat tentang bagaimana implementasi nilai-nilai Islam dapat mempengaruhi kebijakan publik yang adil dan inklusif.

Ketika nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam kebijakan publik, hal ini dapat menghasilkan kebijakan yang memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat dan memastikan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua individu. Misalnya, melalui program-program redistribusi yang adil, perlindungan hak-hak sosial, dan dukungan terhadap usaha mikro dan kecil, nilai-nilai Islam dapat membentuk kerangka kebijakan yang berorientasi pada inklusi dan pengentasan kemiskinan (Zamzam & MM, 2019).

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik (Akmalia, Nurkhalis, & Wildan, 2021). Perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap ajaran Islam dapat menjadi hambatan dalam mencapai konsensus dalam menyusun kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Islam secara tepat. Selain itu, adanya konflik kepentingan politik, korupsi, dan ketimpangan kekuasaan juga dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan publik yang adil dan inklusif.

Dalam konteks ini, rekomendasi penting adalah meningkatkan pemahaman dan dialog antara para pemimpin politik, ulama, dan masyarakat untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan public (Tibi, 2008). Diperlukan kerjasama antara berbagai pihak dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan politik setempat. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik juga menjadi kunci untuk mencapai kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

c. Identitas Muslim dalam Politik

Analisis mengenai identitas Muslim dalam politik mengindikasikan adanya dinamika antara identitas Muslim dan identitas nasional (Wirawan, Suta, & DEWI, 2019). Penelitian sebelumnya telah membahas bagaimana Islam dapat membentuk kebangsaan dan bagaimana identitas nasional mempengaruhi pemahaman agama (Woodward, 2011). Gerakan politik Islam juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi politik dan pemerintahan dalam masyarakat kontemporer.

Identitas Muslim mencerminkan afiliasi agama individu dan kebanggaan terhadap warisan Islam. Namun, identitas nasional juga memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir dan tindakan politik individu Muslim. Identitas nasional mencakup kebanggaan terhadap negara, kesetiaan terhadap simbol-simbol nasional, dan pengakuan terhadap nilai-nilai nasional yang terkadang dapat berbenturan dengan nilai-nilai Islam (Romadhon & Subakti, 2022).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman agama dapat dipengaruhi oleh identitas nasional. Konteks sosial dan politik di mana individu Muslim berada dapat membentuk cara mereka memahami ajaran Islam dan bagaimana mereka menerapkannya dalam politik. Misalnya, dalam negara-negara dengan mayoritas Muslim tetapi beragam kelompok etnis dan budaya, identitas nasional dapat menjadi faktor yang mempengaruhi interpretasi dan praktik keagamaan.

Selain itu, gerakan politik Islam memainkan peran penting dalam mempengaruhi

politik dan pemerintahan dalam masyarakat kontemporer. Gerakan-gerakan ini muncul sebagai respons terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh umat Muslim. Mereka berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dalam politik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Muslim. Namun, gerakan politik Islam juga menghadapi tantangan dan kritik. Beberapa mengkhawatirkan bahwa penekanan terlalu besar pada identitas agama dapat mengabaikan keragaman masyarakat dan mengakibatkan polarisasi politik. Selain itu, terdapat perbedaan dalam interpretasi dan strategi gerakan politik Islam, yang dapat mempengaruhi dampak dan efektivitas mereka dalam mencapai tujuan politik (Subekhi, 2018).

Dalam masyarakat kontemporer, penting untuk mengakui bahwa identitas Muslim dan identitas nasional saling berhubungan dan dapat saling mempengaruhi (Hidayat & Suwanto, 2020). Pemahaman agama dapat dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik, sementara identitas nasional dapat membentuk perspektif politik individu Muslim. Penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara identitas agama dan identitas nasional dalam konteks politik yang inklusif dan harmonis. Dalam hal gerakan politik Islam, perlu adanya dialog, pemahaman, dan kerja sama antara pemerintah, kelompok agama, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Gerakan politik Islam harus mengedepankan nilai-nilai Islam yang inklusif dan toleran, serta mengakui keragaman dan pluralitas dalam masyarakat. Dengan demikian, identitas Muslim dalam politik dapat menjadi sumber kekuatan untuk membangun masyarakat yang adil, stabil, dan harmonis dalam konteks masyarakat kontemporer (Muhtarom, 2019).

d. Tantangan dan Konflik

Analisis mengenai tantangan dan konflik yang terkait dengan hubungan antara Islam dan politik menyoroti perdebatan antara Islam dan konsep sekularisme. Studi sebelumnya telah mengungkapkan adanya perdebatan dan tantangan dalam menggabungkan Islam dengan sistem politik sekuler. Salah satu tantangan utama adalah pertentangan antara nilai-nilai Islam yang bersifat religius dan otoritas politik sekuler yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai agama. Dalam beberapa kasus, konsep sekularisme yang mengharuskan pemisahan antara agama dan negara telah menjadi sumber ketegangan antara pemerintah dan kelompok-kelompok Islam (Tibi, 2008). Kelompok-kelompok Islam sering kali menekankan pentingnya penerapan hukum syariah dan mempertahankan identitas agama mereka dalam kerangka politik yang sekuler (Husaini, Rosyada, Wahab, Murhayati, & Afifah, 2022).

Pada tataran politik praktis masih sering terjadi dimana Islam yang semestinya menjadi nilai utama dan sekaligus yang diperjuangkan dalam berpolitik justru menjadi instrument dalam politisasi. Politisasi Islam ini kemudian menimbulkan islamisme politik. Ketika ini terjadi maka Islam tidak menjadi instrument persatuan tetapi justru menjadi pemicu terjadinya polarisasi di tengah-tengah umat. Polarisasi yang terjadi karena perbedaan pandangan dan pilihan dalam politik praktis ini menjadi fenomena yang semakin mengemuka akhir-akhir ini. Polarisasi terjadi baik dukungan politik di lapangan maupun di

media sosial (Salahudin et al., 2020).

Selain itu, radikalisme dan ekstremisme juga merupakan tantangan penting dalam mencapai harmoni antara Islam dan politik yang moderat dan inklusif. Beberapa kelompok radikal telah menggunakan agama sebagai alasan untuk melancarkan kekerasan dan menyebarkan ideologi ekstrem (Setiadi, 2019). Hal ini menciptakan persepsi negatif terhadap Islam dan menyulitkan upaya membangun hubungan harmonis antara Islam dan politik. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mempromosikan dialog dan pemahaman yang mendalam antara pemimpin politik, ulama, dan masyarakat Muslim. Perdebatan dan diskusi yang terbuka dapat membantu mengatasi perbedaan dan membangun jembatan pemahaman antara Islam dan konsep sekularisme. Selain itu, pendekatan yang kontekstual dan berbasis pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial dapat membantu mengurangi ketegangan dan mempromosikan inklusi dalam konteks politik Islam.

Langkah-langkah untuk melawan radikalisme dan ekstremisme juga harus diambil. Ini termasuk upaya untuk menyebarkan pendidikan yang benar tentang ajaran Islam, mempromosikan pemahaman yang moderat dan toleransi, serta melibatkan masyarakat Muslim dalam memerangi narasi yang radikal (Putri & Yulastri, 2020). Keamanan dan kerja sama antara negara-negara dalam menghadapi ancaman terorisme juga sangat penting untuk mencapai stabilitas politik dan harmoni antara Islam dan politik (Paryanto, Nurmandi, Qodir, & Kurniawan, 2022; Soemitro & Pratama, 2015).

Melalui analisis ini, kami dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara Islam dan politik dalam masyarakat kontemporer memiliki dinamika kompleks. Simbiosis harmonis antara Islam dan politik dapat dicapai melalui partisipasi politik Muslim yang berbasis pada nilai-nilai Islam, kebijakan publik yang mencerminkan keadilan sosial, dan pengakuan terhadap identitas Muslim dalam konteks politik nasional. Namun, tantangan seperti perdebatan tentang sekularisme dan radikalisme juga harus diatasi. Pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan ini memberikan kontribusi penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis. Implikasi dari hasil analisis ini adalah pentingnya pendekatan yang holistik dan kontekstual dalam menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip politik dalam konteks masyarakat kontemporer. Rekomendasi ke depan termasuk perlunya dialog antar pemangku kepentingan, pendidikan yang mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang Islam dan politik, serta kebijakan yang mendorong inklusivitas dan partisipasi aktif Muslim dalam proses politik.

Simpulan

Dalam pembahasan mengenai Islam dan politik, dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik dan kebijakan publik di berbagai negara dengan mayoritas Muslim. Konsep politik Islam mencakup prinsip-prinsip agama Islam yang membentuk landasan dalam pengaturan negara dan masyarakat. Keadilan sosial dalam Islam menjadi nilai penting yang berpengaruh dalam pembentukan kebijakan publik yang

adil dan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik dapat membawa manfaat signifikan. Konsep keadilan sosial dan prinsip-prinsip ekonomi Islam mempengaruhi kebijakan ekonomi dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Prinsip musyawarah dalam Islam juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, sehingga kebijakan publik mencerminkan nilai-nilai Islam yang berpusat pada keadilan, partisipasi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, terdapat keterbatasan dalam implementasi konsep politik Islam. Perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap ajaran Islam dapat menyebabkan perbedaan pandangan dalam mengatur politik dan kebijakan publik. Selain itu, ketegangan antara otoritas politik dan otoritas agama dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan konsep politik Islam yang ideal. Untuk itu, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, penting untuk meningkatkan pemahaman dan dialog antara para pemimpin politik dan ulama agar tercapai pemahaman yang lebih baik tentang konsep politik Islam dan implementasinya dalam kebijakan publik. Kedua, negara-negara dengan mayoritas Muslim perlu mengembangkan mekanisme yang memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, sehingga kebijakan publik lebih representatif dan inklusif. Ketiga, perlu adanya pendekatan kontekstual dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik setempat. Dalam menghadapi tantangan dan konflik, konsep politik Islam dapat menjadi sumber inspirasi dalam membentuk kebijakan publik yang adil, inklusif, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip agama. Dengan pemahaman yang mendalam dan implementasi yang tepat, konsep politik Islam dapat menjadi landasan yang kuat untuk mencapai kesejahteraan sosial, keadilan, dan stabilitas politik dalam masyarakat Muslim.

Referensi

- Adamec, L. W. (2009). *Historical Dictionary of Islam*. Maryland: SCARECROW PRESS, INC.
- Akmalia, K., Nurkhalis, & Wildan, R. (2021). Islam dan Tantangan Modernitas Perspektif Nurcholish Madjid. *Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 178–189.
- Arifin, M. K. (n.d.). Islam, demokrasi dan transisi otonomi khusus: politik dan dinamika identitas lokal di Aceh, Indonesia. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Aziz, F. A. (2018). Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Budiarti, B. (2018). Islam Dan Negara Modern: Ijtihad Pemikiran Politik Soekarno Tentang Hubungan Agama Dan Negara Pancasila. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*.
- Christman, A. (2009). *The Qur'an, Morality and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur*. Leiden-Boston: Koninklijke Brill NV.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung digilib.uinsgd.ac.id*.
- Daulay, H. (2020). Dinamika Dakwah dan Politik Islam di Malaysia (Kajian Manajemen Dakwah dan Politik Partai Islam PAS). *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*
- Fathi, S. A. (2023). Perihal Penyebaban Dalam Sejarah. *Nota Pengajian Sejarah*.

- theindependentinsight.com.
- FAUZI, A. R. (2017). *Politik Identitas Komunitas Muslim Tionghoa (Analisis Pembentukan Identitas Muslim Tionghoa Indonesia di Banyumas)*. repository.unsoed.ac.id.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). *Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran*. books.google.com.
- Hidayat, R., & Suwanto, S. (2020). Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*.
- Hoddin, M. S. (2020). Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra'*.
- Husaini, A. Al, Rosyada, I., Wahab, J. A., Murhayati, & Afifah, M. N. (2022). Tantangan Multikulturalisme dalam berbagai Aspek di Indonesia. *YASIN: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya*, 2(1), 152-162.
- Ikhwan, A. (2018). *Filsafat Pendidikan Islam: Memahami Prinsip Dasar*. Yogyakarta: CV. Diandra Kreatif.
- Karim, S. (2016). Islam Ideologis dan Gerakan Politik Islam Kontemporer. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*. core.ac.uk.
- Kurniawan, S. (2021). *Integrasi Nilai-Nilai Keislaman Dan Kebangsaan Dalam Pendidikan Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia)*. dspace.uui.ac.id.
- Linjakumpu, A. (2008). *Political Islam in the Global World*. UK: ITHACA PRESS.
- Mahirah, B. (2018). PRINSIP DASAR ISLAM TENTANG MANUSIA. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*.
- Muarif, A. S., & Yunus, M. (2019). Tinjauan Teologi Islam di Dunia: "Isu dan Prospek" Frederick Mathewson Denny. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.
- Mubarak, H. A. Z. (2019). *Islam Faktual: Ajaran, Pemikiran, Pendidikan, Politik Dan Terorisme*. books.google.com.
- Muhtarom, M. S. I. A. (2019). *Gerakan Keagamaan Islam Transnasional: Diskursus dan Kontestasi Wacana Islam Politik di Indonesia*. books.google.com.
- Musta'id, A. (2022). Sejarah Islam dan Politik Afghanistan. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan*
- Noer, A. (2019). Pluralisme Agama Dalam Konteks Keislaman Di Indonesia. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*. core.ac.uk.
- Nurdin, A. A. (2016). Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam dan Demokrasi. *JRP (Jurnal Review Politik)*.
- Paralihan, H. (2019). Hubungan antara Islam dan Demokrasi: Menguatnya Politik Identitas Ancaman Kemanusiaan di Indonesia. *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*.
- Paryanto, Nurmandi, A., Qodir, Z., & Kurniawan, D. (2022). Eradicating Terrorist Networks on Social Media: Case Studies of Indonesia. In T. (eds) Antipova (Ed.), *Digital Science. DSIC 2021. Lecture Notes in Networks and Systems: Vol. 381 LNNS* (pp. 433-442). https://doi.org/10.1007/978-3-030-93677-8_38
- Price, D. E. (1999). *Islamic Political Culture, Democracy, and Human Rights*. <https://doi.org/10.2307/2586076>
- Putra, N., & Lubis, F. H. (2019). Diskursus Politik Islam dan Kebijakan Ideologis Media Massa di Sumatera Utara. *Persepsi: Communication Journal*.
- Putri, F. R., & Yulastri, W. (2020). Islamic Religious Education Module Understanding Antiradicalism and Terrorism: Practicality. *International Conference on Progressive* Retrieved from <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icope-19/125937541>
- Qadir, Y. bin A. (2018). *Prinsip Dasar Islam Menuntut Al-Qur'an Dan As-Sunnah Yang Shahih*.

- Bogor: Pustaka At-Taqwa.
- Qorib, M. (2020). INTEGRASI ETIKA DAN MORAL Spirit dan Kedudukannya dalam Pendidikan Islam. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*. publication.umsu.ac.id.
- Rahmanu, A. (2022). Paradigma hubungan internasional dalam politik Islam dan peran ilmu politik bagi kehidupan. ... *POLITIK ISLAM DAN PERAN ILMU POLITIK ...* etheses.uinsgd.ac.id.
- Ridwan, R. (2017). Hubungan Islam Dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.
- Ridwan, R. (2022). Integrasi Nilai-Nilai Agama dalam Mengembangkan Peradaban Islam. *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison ...*
- Romadhon, S., & Subakti, T. (2022). Toleransi Dan Politik Identitas: Studi Tentang Perilaku Politik Kebangsaan Di Indonesia. *As-Shahifah: Journal of ...*
- Sachedina, A. (2003). *The Role of Islam in the Public Square: Guidance or Governance?* (No. 5). <https://doi.org/10.1515/9789048503957-001>
- Salahudin, S., Nurmandi, A., Jubba, H., Qodir, Z., Jainuri, J., & Paryanto, P. (2020). Islamic Political Polarisation on Social Media during the 2019 Presidential Election in Indonesia. *Asian Affairs*, (November). <https://doi.org/10.1080/03068374.2020.1812929>
- Salih, M. A. M. (2009). *Interpreting Islamic Political Parties*. New York: Palgrave Macmillan.
- Setiadi, O. (2019). Gerakan Islam Politik: Problem Ideologi Radikal, Global Jihad, dan Terorisme Keagamaan: Ideologi radikal, Global Jihad, Terorisme Keagamaan dan Islam Politik. *Politea: Jurnal Politik Islam*.
- Soemitro, D. P., & Pratama, I. W. (2015). Scope of State Responsibility Against Terrorism in International Law Perspective; Indonesian Cases. *Jurnal Cita Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1841>
- Subekhi, M. (2018). Akar Gerakan Politik Fundamentalisme Islam di Era Modern (Studi terhadap Pemikiran Karen Armstrong). *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan ...*
- Suhaili, A. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*.
- Tanabora, Y. E. (2020). Islam Nusantara: Harapan dan Tantangan. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*. ejournal.uin-suka.ac.id.
- Tibi, B. (2005). Islam between culture and politics. *Islam Between Culture and Politics*, 1–334. <https://doi.org/10.1057/9780230204157>
- Tibi, B. (2008). *Political Islam, World Politics and Europe: Democratic Peace and Euro-Islam versus Global Jihad*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Venardos, A. M. (2010). Current issues in Islamic banking and finance: Resilience and stability in the present system. In *Current Issues in Islamic Banking and Finance Resilience and Stability in the Present System*. <https://doi.org/10.1142/6979>
- Wirawan, I., Suta, G. M. A., & DEWI, K. S. (2019). Identitas Politik dan Politik Identitas Masyarakat Muslim di Bali. ... *Nasional Hukum Dan ...* eproceeding.undiksha.ac.id.
- Woodward, M. (2011). *Java, Indonesia and Islam*. London and New York: Springer Dordrecht Heidelberg.
- Zain, A. (2019). Khilafah dalam Islam. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*.
- Zamzam, H. F., & MM, M. H. (2019). *Perekonomian Islam: Sejarah dan Pemikiran*. books.google.com.
- Zhafira, A. (2017). Efek moderasi kepercayaan politik terhadap hubungan antara religiusitas

Islam dan intoleransi politik. *Jurnal Psikologi Sosial*.